

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjabaran yang telah penulis paparkan di atas, berkenaan dengan Konflik Internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pada Tahun 2004-2013 yang ditinjau dari faktor penyebab dan dampak, maka berikut ini penulis akan menyajikan inti permasalahan dari konflik yang terjadi diinternal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), setidaknya hal tersebut dapat diidentifikasi dalam 3 hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Perbedaan pandangan dalam mengakumulasi kapital.

Perbedaan pandangan dalam mengakumulasi kapital ini dapat terlihat dari gonjang ganjing keberadaan mahar politik yang terjadi diinternal partai guna mendukung atau mengusung salah satu pasangan calon yang masuk dalam bursa pemilihan umum, kubu keadilan menduga peningkatan kekayaan secara tiba-tiba yang didapatkan oleh kubu kesejahteraan merupakan salah satu bukti nyata keberadaan mahar politik ditubuh PKS.

Di samping hal tersebut, Justifikasi keberadaan mahar politik ini pun berangkat dari perbedaan kekayaan yang menganga lebar diantara kubu keadilan dan kubu kesejahteraan. Kubu kesejahteraan cenderung lebih pariente dengan

memamerkan sedikit kemewahan yang dimilikinya, sedangkan kubu keadilan cenderung lebih sederhana dalam kehidupan keseharian. Hal ini terjadi dikarenakan Kubu kesejahteraan cenderung mampu untuk mengakumulasi kapital, lain halnya dengan kubu keadilan yang dinilai tidak cakap dan tidak luwes dalam melakukan tindakan politik pragmatis tersebut.

2. Perbedaan pandangan mengenai orientasi perjuangan partai

Perbedaan pandangan diantara kubu keadilan dan kubu kesejahteraan sangat berkaitan erat dengan orientasi perjuangan partai, disatu sisi kubu keadilan berupaya untuk membumikan islam dengan memakai jalur politik sebagai alat perluasan penegakan ruh keislaman, sehingga barometer keberhasilan bukan pada seberapa besar kekuasaan yang didapatkan, melainkan seberapa besar pengaruh infiltrasi dakwah yang dilakukan oleh PKS terhadap masyarakat. Berbeda halnya dengan kubu kesejahteraan yang lebih menekankan pada kekuasaan sebagai barometer utama guna menilai efektifitas infiltrasi dakwah kepada masyarakat, pada tataran ini, kubu kesejahteraan menempatkan dakwah sebagai komoditas politik yang harus dieksploitasi guna memenangkan partai pada setiap pemilihan umum.

Perbedaan Orientasi kekuasaan ini dapat terlihat secara gamlang, ketika partai menetapkan pilihan untuk melangsungkan acara Mukernas di Bali pada tahun 2008, seperti yang sudah kita ketahui, Provinsi Bali merupakan Provinsi dengan mayoritas

1.1.1. Hal ini juga dapat dilihat dari hubungan antara PKS yang

merupakan salah satu partai dengan basis konstituen umat muslim, sehingga besar kemungkinan acara Mukernas di Bali ini sebagai salah satu bentuk taktik strategis yang dilakukan oleh partai guna memperluas ceruk pasar pemilih yang tidak hanya terpaku pada golongan islam saja, tetapi terhadap golongan lain yang berada di luar umat islam.

Selanjutnya, penggunaan logo dalam acara Mukernas pun tak luput dari tudingan miring beberapa kader yang berada diinternal partai, kubu keadilan menganggap logo acara Mukernas di Bali mirip dengan Pura yang menjadi tempat beribadah umat hindu. Tudingan itu segera dibantah oleh kubu kesejahteraan dengan mengatakan bahwa logo acara Mukernas bukan Pura layaknya tanggapan yang selama ini beredar diinternal partai.

Di samping hal tersebut, wacana partai terbuka yang santer terdengar pada saat dilangsungkan acara Mukernas pun menjadi pertentangan diantara kader diinternal partai, kubu keadilan menganggap wacana partai terbuka adalah ilegal karena tidak pernah menjadi keputusan partai, akan tetapi kubu kesejahteraan menganggap wacana partai terbuka bisa dijadikan pintu masuk guna mendapatkan suara dari pemilih non muslim.

Selain dari pada itu, perbedaan orientasi partai pun terlihat pada saat menafsirkan pencapaian politik PKS pada tahun 2009, bagi kubu keadilan hasil pemilihan umum pada tahun 2009 merupakan pencapaian politik yang buruk, hal ini

terjadi dikarenakan jumlah pemilih tidak berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah kader. Akan tetapi bagi kubu kesejahteraan, PKS mengalami peningkatan yang cukup signifikan, judgment ini didasarkan pada hitungan matematika politik yang menjadikan peningkatan jumlah kursi sebagai variabel utama guna menentukan peningkatan atau penurunan dalam pemilihan umum

3. Dominasi pucuk pimpinan partai

Dominasi pucuk pimpinan partai yang dilakukan oleh kubu kesejahteraan bisa dilihat dari struktur kepengurusan partai pada tingkatan pusat, dari mulai Majelis Syura PKS, Majelis Pertimbangan Partai, Dewan Syari'ah Pusat PKS sampai Dewan Pimpinan Pusat PKS yang semuanya diketuai oleh gerbong kesejahteraan. Akan tetapi jika ditinjau dari segi kuantitas, kubu keadilan lebih besar jumlahnya, dengan persentase 20% untuk kesejahteraan dan 70% untuk keadilan dan 10% untuk kader dengan perilaku politik oportunis.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka berikut ini adalah rekomendasi yang akan penulis berikan:

1. Mengganti Hilmi Aminuddin Sebagai Ketua Majelis Syura, dikarenakan sesuai dengan AD-ART jabatan Majelis Syura hanya 2 kali masa jabatan, sehingga jika dikitung maka kepemimpinan Hilmi Aminuddin seharusnya

2. Melakukan perdamaian diantara kedua kubu tersebut, walaupun kesempatan perdamaian ini semakin tertutup, akan tetapi hal ini patut dicoba guna meredam konflik diinternal PKS yang dapat merugikan partai secara elektabilitas dan soliditas.
3. Kembali kepada jati dirinya sebagai partai dakwah yang berupaya membumikan ajaran islam.
4. Menghentikan praktik-praktik politik transaksional guna mendukung atau mengusung salah satu pasangan calon yang akan naik dalam pemilihan umum.
5. Menghentikan praktik-praktik politik koruptif yang tentunya dapat memperburuk citra partai dan umat islam secara keseluruhan